

**PERAN TIM PENDAMPING PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DALAM  
UPAYA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KELOMPOK  
USAHA PRODUKTIF DI KECAMATAN COLOMADU  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**Liliek Winarni  
( Dosen FISIP )**

**ABSTRAK**

Peran Tim Pendamping sebagai motivator dalam tahap Persiapan dapat mendeteksi permasalahan yang dihadapi, sebagai Fasilitator dalam tahap pelaksanaan dapat bekerjasama satu dengan yang lain dalam usaha yang sama mendirikan Paguyuban dan sebagai Katalisator dalam tahap pasca pendampingan dapat pelatihan untuk menambah pengalaman atau meningkatkan peluang dalam pemasaran produk. Hasil pendampingan yang dilakukan dapat menurunkan tunggakan kolektibilitas dari anggota Unit Ekonomi Produktif (UEP), sehingga tim pendamping berperan dalam meningkatkan pendapatan UEP Kecamatan Colomadu.

Kata Kunci : Peran Tim Pendamping, PNPM-MP, Kemiskinan.

**ABSTRACT**

*Role Assistance Team as a motivator in the Preparation stage can detect problems faced, as a facilitator in the implementation phase can cooperate with each other in the same business founded the Society and as a catalyst in the post mentoring can add to the experience or training to increase opportunities in the marketing of products. Results mentoring is done can reduce the arrears collectability of members Productive Economy Unit(UEP), so the escort team plays a role in increasing the income of the UEP District of Colomadu.*

*Keywords: Role Assistance Team, PNPM-MP, Poverty*

**PENDAHULUAN**

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan, efektivitasnya terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Untuk itu, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip Dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien (Pendulum PNPM Mandiri, 2007).

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja maka salah satu jalan adalah dengan memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan

salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan Lembaga Keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan terpenting. Kebijakan pemberdayaan masyarakat dianggap resep mujarab karena hasilnya dapat berlangsung lama. Isu-isu kemiskinan senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan

hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan (Mardi Yatmo Hutomo, 2000: 16).

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulative untuk memperkuat dan legitimasi; dan (4) kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Priyono dan Pranarka, 2006 : 39). Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu

masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).

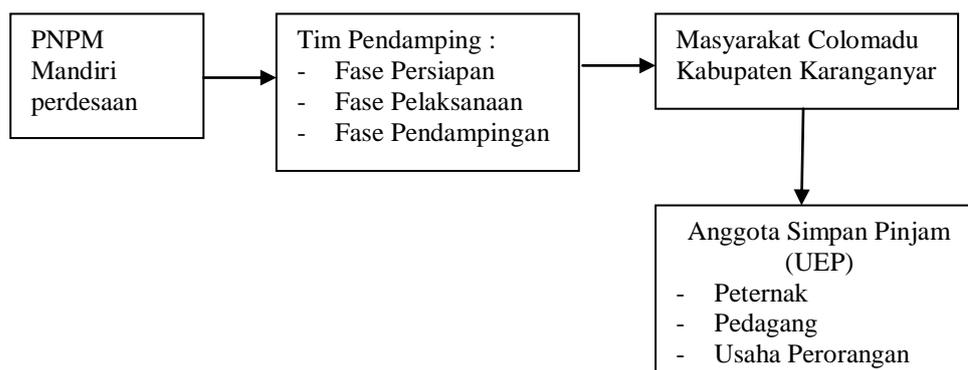
### Praktik Pemberdayaan Bidang Ekonomi Saat Ini

Dari berbagai program dan atau proyek pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, apakah itu program Inpres Desa Tertinggal (IDT), proyek Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK), Proyek Pengembangan Kawasan Desa-kota Terpadu (PARUL), Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Lokal (PEML/LED) dan Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE), PNPM, secara umum memiliki kemiripan dimensi pendekatan, seperti misalnya: (1) bantuan modal bergulir; (2) bantuan pembangunan prasarana; (3) bantuan pendampingan, (4) penguatan kelembagaan; dan (5) penguatan kemitraan usaha (Hutomo, 2000 : 23-25).

### Kerangka Dasar Pemikiran

Dari telaah pustaka tersebut, maka disusun suatu kerangka pemikiran, untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran teoritis digambarkan berikut:



### METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah peranan dari Tim pendamping PNPM-MP Mandiri Perdesaan dalam membantu Kelompok Ekonomi Produktif untuk meningkatkan penghasilannya, berdasarkan hal tersebut, maka jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu memaparkan atau menggambarkan, menafsir dan menganalisis data sesuai dengan fakta yang terjadi di lokasi penelitian.

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan carapengumpulan data dengan jalan

tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.

#### 2. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang diperoleh melalui pencatatan dan pemikiran data-data dokumen yang ada hubungannya atau dibutuhkan dalam penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, yaitu Pengumpulan data, reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan data.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan kelompok yang dilakukan oleh UPK Kecamatan Colomadu rata-rata per kelompok adalah setiap bulan (1)satu kali. Dari hasil pendampingan kelompok yang dilakukan oleh UPK menghasilkan beberapa perubahan menuju ke arah yang lebih baik, antara lain adanya beberapa kelompok yang bersedia membayar angsurannya yang sudah beberapa bulan menunggak dan adanya perubahan perbaikan terhadap administrasi yang berada di tingkat kelompok.

UPK Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu lembaga di tingkat kecamatan dalam menjalankan kegiatannya tak lepas dari merealisasikan kebijakan-kebijakan pokok PNPM MANDIRI PERDESAAN dengan konsep mengelola dan melaksanakan semua tahapan agar tujuan dari PNPM MANDIRI PERDESAAN sendiri dapat dicapai secara optimal, merata dan dapat dirasakan oleh segenap kalangan masyarakat yang ada di Kecamatan

Colomadu, Kabupaten Karanganyar.

Tingginya respon masyarakat terhadap tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dalam setiap tahunnya, menggambarkan bahwa betapa program ini cukup berhasil mencapai tujuannya. Salah satu hal yang paling menonjol adalah tingkat partisipatif masyarakat terhadap program ini. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan menunjukkan tingkat swadaya yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan pengetahuan masyarakat terhadap pola dan Kinerja pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan itu sendiri baik di tingkat desa maupun di tingkat Kecamatan. Ditambah hasil pelaksanaan pembangunan kegiatan sarana prasarana benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena itu merupakan keinginan mereka yang dipilih langsung dalam musyawarah-musyawarah perencanaan yang melibatkan berbagai pihak.

Data kondisi Usaha Ekonomi Produktif di Kecamatan Colomadu per Desember 2012 adalah sebagai berikut:

### KONDISI USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2012

No	Keterangan	Jumlah	Sat
1	Jml Kelompok	97	kel
2	Penerima Pinjaman	582	orang
3	Jml Dana yang sudah Digulirkan	147	Rp Juta
4	Saldo Pinjaman di Masyarakat	28	Rp Juta
5	Prosentase Pengembalian	83	%
6	Tunggakan Kolektibilitas V *)	54	Rp Juta
	*) Tunggakan Lebih dari 6 bl		

Sumber: LPJ Musyawarah Antar Desa PNPM MP Kecamatan Colomadu

Berdasarkan hasil tabel tersebut maka diketahui bahwa dalam kenyataannya pada tahun 2012 masih terdapat tunggakan kolektibilitas yang

mencapai hampir Rp 54 juta, di mana tunggakan tersebut sudah lebih dari 6 bulan, hal ini dapat disebabkan oleh faktor usaha anggota mengalami

kerugian, ataupun kelompok UEP belum mempunyai pemahaman yang baik tentang usahanya. Oleh karena itu UPK Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) terbagi ke dalam tiga kegiatan antara peran pendamping sebagai motivator, peran pendamping sebagai fasilitator dan peran pendamping sebagai katalisator pada tahap persiapan, pelaksanaan dan pada tahap pasca pendampingan.

### **1. Peran Pendamping Pada Fase Persiapan**

Peran pendamping pada fase persiapan ini adalah berupaya menjadi motivator yaitu berupaya untuk menyadarkan dan mendorong kelompok untuk mengenali potensi dan masalah, dan dapat mengembangkan potensinya untuk memecahkan permasalahan itu. Peran motivator akan dapat berhasil secara maksimal jika pendamping memahami kelompok yang didampingi, karena itu pendamping dapat hadir ditengah mereka, hidup bersama mereka, belajar dari apa yang mereka miliki dan mengajarkan apa yang tidak mereka ketahui. Pada proses pendampingan ini UPK Kecamatan Colomadu sebagai motivator

### **2. Peran Pendamping Pada Tahap Pelaksanaan**

Peran *fasilitator* didefinisikan sebagai peran pendampingan yang mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan, mengkondisikan iklim kelompok yang harmonis, serta memfasilitasi terjadinya proses saling kejasama dalam kelompok. Dalam peran ini, pendamping berusaha memberi pengarahan tentang penggunaan berbagai teknik,

strategi, dan pendekatan dalam pelaksanaan program.

UPK Kecamatan sebagai tim pendamping secara umum menjalani peran sebagai agen perubahan (*agent of change*) di tengah-tengah masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. Upaya mereka sebagai agen perubahan adalah mendampingi dan mengarahkan keinginan anggota UEP dalam proses pengambilan inovasi atau gagasan baru. Sebagai agen perubahan, UPK Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar berusaha memfasilitasi proses pengambilan gagasan-gagasan baru dan membuat proses penyebaran inovasi berjalan secara bertahap atau pelan-pelan dalam rangka meningkatkan pendapatan anggota UEP.

Berdasarkan hal tersebut peran UPK Kecamatan Colomadu dalam tahap pendampingan adalah mendampingi anggota UEP untuk mengembangkan usahanya dengan membentuk usaha bersama ataupun memberikan solusi-solusi dalam upaya meningkatkan pemasaran produknya. Selain itu UPK Kecamatan Colomadu tetap melakukan evaluasi terhadap upaya pendampingan yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendampingan yang akan datang.

### **3. Peran Pendamping pada Tahap Pasca Pendampingan**

Peran pendamping dalam tahap pasca pendampingan adalah sebagai katalisator dalam hal ini berarti bahwa UPK Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar sebagai tim pendamping dapat melakukan aktivitas sebagai penghubung antara kelompok pendampingan dengan dengan

lembaga di luar kelompok maupun lembaga teknis lainnya, baik lembaga teknis pelayanan permodalan maupun pelayanan keterampilan berusaha dalam rangka pengembangan jaringan usaha anggota UEP. Peran-peran pendamping tersebut hanya akan dapat dilaksanakan secara maksimal jika pendamping memahami kelompok yang didampinginya, karena itu pendamping diupayakan dapat hadir di tengah mereka belajar dari apa yang mereka miliki, mengajar dari apa yang mereka ketahui, dan bekerja sambil belajar.

UPK Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar menjalankan fungsi katalisatornya dengan cara bekerjasama dengan pemerintah ataupun dengan stakeholder yang terkait yang turut berpartisipasi dalam program PNPM sejak tahun 1999 hingga sekarang. Dalam kegiatannya, UPK Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan BKAD dalam rangka mengembangkan UEP Kecamatan Colomadu Kabupaten

Karanganyar.

Tiga pilar pembangunan mewujudkan dalam kontribusi keberdayaan UPK Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar walaupun dalam porsi yang belum ideal peran : pemerintah, swasta (dunia usaha) dan masyarakat sudah mewujudkan. Sebagai bagian penting dari proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, berdasarkan keputusan Bupati Karanganyar Unit Pengelola Kecamatan atau UPK berperan dalam membantu anggota UEP untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Sedangkan dari hasil pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh tim pendamping sebagai motivator, fasilitator, dan katalisator maka telah berhasil meningkatkan pendapatan dari anggota UP Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Hal ini dapat diketahui secara riil bahwa dari segi tunggakan kredit dan pengembalian anggota UEP didapatkan hasil pada tahun sebagai berikut

**KONDISI USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) KECAMATAN  
COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013**

No	Keterangan	Jumlah	Sat
1	Jml Kelompok	132	Kel
2	Penerima Pinjaman	642	orang
3	Jml Dana yang sudah Digulirkan	237	Rp Juta
4	Saldo Pinjaman di Masyarakat	49	Rp Juta
5	Prosentase Pengembalian	92	%
6	Tunggakan Kolektibilitas V *)	38	Rp Juta
	*) Tunggakan Lebih dari 6 bl		

Sumber : LPJ Musyawarah Antar Desa PNPM MP Kecamatan Colomadu

Dari hasil tersebut diketahui bahwa tunggakan kolektibilitas tahun 2012 adalah sebanyak 54 juta

sedangkan pada tahun 2013 tunggakan kolektibilitas menurun menjadi sekitar Rp 38 juta, hal ini menandakan bahwa

kesadaran anggota UEP sudah semakin baik dalam mengembalikan pinjamannya, hal ini disebabkan karena tingkat pendapatan anggota UEP yang semakin baik setelah tim pendamping memberikan pendampingan kepada anggota kelompok UEP dalam melaksanakan usaha produktifnya. Dimana masih terdapat 8% pengembalian yang mengalami tunggakan lebih dari 6 bulan, hal ini dikarenakan mayoritas sebagai petani baik petani padi maupun petani jagung yang mengangsur berdasarkan jangka waktu panennya, sehingga tidak setiap bulan diangsur, hal ini memang sudah menjadi kesepakatan antara anggota UEP dengan UPK Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran tim pendamping dalam tahap persiapan adalah sebagai motivator yaitu membantu anggota UEP Kecamatan Colomadu untuk mendeteksi permasalahan yang dihadapi yang menyebabkan anggota tidak dapat melakukan pembayaran angsuran, setelah diketahui permasalahannya maka tim pendamping berupaya untuk memberikansolusi kepada anggotanya;
2. Peran tim pendamping pada tahap pelaksanaan adalah sebagai fasilitator yaitu membantu anggota UEP Kecamatan untuk bekerja sama satu dengan yang lain, yaitu anggota kelompok dalam usaha yang sama diberikan arahan untuk mendirikan paguyuban sehingga dalam pemasaran produk dapat lebih terprogram dengan baik;
3. Peran tim pendamping dalam tahap pasca pendampingan adalah sebagai katalisator yaitu membantu anggota UEP Kecamatan Colomadu untuk

mendapatkan pelatihan ataupun mendapatkan dari dinas terkait untuk menambah pengalaman ataupun meningkatkan peluang dalam pemasaran produk;

4. Dari hasil pendampingan yang dilakukan maka dapat menurunkan tunggakan kolektibilitas dari anggota UEP, hal ini berarti bahwa tim pendamping berperan dalam meningkatkan pendapatan anggota UEP Kecamatan Colomadu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, 2006, *Teologi Pembangunan Kemiskimm*, Rimbooks, Jakarta.
- Bappenas, 2004, *Rencana Strategik Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta.
- Departemen dalam Negeri Direktorat jenderal pemberdayaan masyarakat dan desa, 2008, *PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan*, Jakarta : Depdagri.
- HB. Sutopo, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta : UNS Press.
- Mardi Yatmo Hutomo, 2000, *Pemberdayaan masyarakat dalam Bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, Jakarta : Seminar Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas.
- Pendum PNPM Mandiri, 2007*
- Setiadi, N. J. 2003. *Perilaku Konsumen dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. Jakarta : Kencana.

Suharsimi, Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suharto, dkk, 2004, *Dimensi Kemiskinan*. Yogyakarta : SMER

Sumodiningrat, Gunawan, 1999, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.